

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zaenudin. Metode Penelitian Hukum, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asikin, Zainal dkk. Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Cet. 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Azhar, Muhamad, Buku Ajar Ketenagakerjaan. Semarang, 2015.
- Budiono, Abdul Rachmat. Hukum Perburuhan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Kartanegoro, Santanoe, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit). Jakarta, YTKI, 1999.
- Khakim, Abdul, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soepomo, Iman, Hukum Perburuhan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Sunyoto, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia, 2015.
- Ridwan, Halim. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Taufani, Galang & Suteki. Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik).

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Wahyudi, Eko, Hukum Ketenagakerjaan, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wijayanti, Asri, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

INTERNET

Hukumonline. 4 Prinsip PHK Menurut UU Cipta Kerja. Dikutip dari

www.hukumonline.com/berita/a/4-prinsip-phk-menurut-uu-cipta-kerja-lt624281128ebf7/.

Hukumonline. Aturan Pemberian Surat Peringatan Karyawan. Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemberian-surat-peringatan-karyawan-lt54f683eedcdf2/>

Hukumonline. Bisakah Force Majeure Menjadi Alasan PHK?. Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-force-majeure-menjadi-alasan-phk-cl2572/>

Hukumonline. Buruh Sakit boleh di-PHK? Simak Penjelasannya. Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/buruh-sakit-boleh-di-phk-simak-dulu-penjelasannya-lt620b3c660749d/>

Hukumonline. Fungsi dan Dasar Hukum Paklaring Untuk Bekerja. Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-paklaring-lt680b8fe86fbb8/>

Hukumonline. Jenis-jenis Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia. Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-perlindungan-tenaga-kerja-di-indonesia-lt6321be2336d65/>

Hukumonline. Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan. Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-tergugat-tidak-mau-melaksanakan-putusan-pengadilan-lt5c5a7264e87a2/>

Hukumonline. Mengenali 4 Jenis PHK dalam Hubungan Industrial. Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-4-jenis-phk-dalam-hubungan-industrial-lt612c88d9aec00/?page=all>

Hukumonline. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>

Hukumonline. Tahap dan Penyelesaian Masalah PHK karena Efisiensi, Dikutip dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahap-dan-penyelesaian-masalah-phk-karena-efisiensi-lt5ebd1d78eb768/>

JURNAL

Angelia & Lie, Gunardi. Penerapan Uang Pesangon Bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 2, (2024).

- Basofi, Bagus, & Fatmawati, Irma. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *Professional Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, (2023).
- Cahyaningtyas, V. A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Untuk Efisiensi dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2022).
- Darmawan, Kevin. Perlindungan Hukum Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (*Spin Off*) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, (2025).
- Dewangga, et. al. Perbedaan Makna Alasan PHK: Implikasi Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dan Kewajiban Perusahaan, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VIII, No. 1, (2024).
- Fajri, Raditia dkk. Analisis Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Penuntasan Perselisihan Hubungan Industrial, *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS)*, Vol. 2, No. 3, (2023).
- Farras, Al Diva & Suraji. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Resesi Ekonomi, *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 2, No. 3, (2025).

- Fernandi Mahendrasula. Dampak Penyelenggara Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Nasional di Indonesia, *Jurnal Hukum Visio Justicia 1*, Vol. 1, No. 1, (2021)
- Fitria, Annisa. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja atau Buruh yang Terkena PHK Akibat Efisiensi di Perusahaan, *Lex Jurnalica*, Vol. 15, No. 3, (2018).
- Estheralda, Evanie & Rasji. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi Untuk Mencegah Terjadinya Kerugian, *NUSANTARA: JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL*, Vol. 10, No. 1, (2023).
- Gultom, Walman, et. al. Peranan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Implikasi, Keuntungan, dan Kelemahan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9 (25), (2023).
- Juan, Elia, et. al. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja karena Alasan Efisiensi pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 5, (2025).
- Joka, Rikhardus & Sutopo, Maria. Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Mewujudkan Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan, *Binamulia Hukum*, Vol 7, No. 2, (2018).
- Lie, Gunardi & Hananto, Ramdhan. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS.PHI/2023/PN.JKT.PST), *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, (2024).

- Mantili, Ria. Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 1, (2021).
- Maringan, Nikodemus. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Vol. 3, (2020).
- Nurrohim, Tri Septiyo, et. al. Perlindungan Hukum Pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja pada Pasca Undang-Undang Cipta Kerja), *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 3, 2024).
- Omega, Giofani, et. al. Proses Pemutusan Hubungan Kerja pada Pekerja yang Melakukan Kesalahan, *Jurnal Fakultas Hukum Les Privatum*, Vol. 1, No. 1, (2024).
- Prasetianingsih, Yully, et. al. Upaya Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Batas Waktu Gugatan, *Binamulia Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2025).
- Purwito, Edy. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya, *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 13, No. 1, (2023).
- Rahayu, Antina, et. al. Kepailitan dan Hak Karyawan yang di-PHK Perusahaan, *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 4, (2025).

Saida, Henny, et. al. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja karena Perusahaan Pailit, *Jurnal Hukum Justice*, Vol. 1, No. 1, (2023)

Sari, Indah. Penetapan Hak-hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Universitas Surya Darma*.

Widodo, Tris. Penyelesaian Secara Konsiliasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004, *Jurnal Warta Edisi: 49* (2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan
Pekerjaan